

**Analisis Audit Kinerja Berbasis IT menggunakan Framework
COBIT 5: Studi Kasus Efektivitas Penggunaan Aplikasi
SISWASKEUDES pada Pelaksanaan Audit Kinerja Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa di Inspektorat Kabupaten Sukabumi**

Irwan Subhan Azuari

Universitas Jenderal Achmad Yani

azuarimalik@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the utilization of the Village Financial Supervision System (SISWASKEUDES) in supporting the implementation of Performance Audits of Village Financial and Asset Management by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) at the Sukabumi Regency Inspectorate, viewed through the COBIT 5 framework. This study employed a qualitative descriptive approach. The research data were obtained through questionnaires distributed to 20 APIP personnel who had been involved in Performance Audits of Village Financial and Asset Management using SISWASKEUDES and interviews with three informants who had experience in implementing the application. The questionnaire data were analyzed based on the average scores of seven research aspects, while the interview results were used to deepen the analysis and identify problems encountered in practice. The findings were subsequently analyzed and classified according to the relevant domains of COBIT 5. The results indicate that SISWASKEUDES provides benefits in data provision, audit documentation, time efficiency, and support for the implementation of performance audits. However, its utilization remains partial and has not been optimally integrated into the entire audit cycle. The data collection stage has been supported by the system, whereas the analysis, preparation of audit working papers, and reporting processes are still largely conducted manually. The identified obstacles include limited auditor competencies and training, inconsistent data quality and validity with actual field conditions, application errors and technical limitations, limited audit analysis features, and the continued dominance of manual processes. The findings also indicate that the optimization of SISWASKEUDES is influenced not only by system capabilities but also by users' perceptions, attitudes, readiness, and abilities. Therefore, continuous auditor training, strengthened application-use policies, improved system stability and user-friendliness, development of audit analysis features, strengthened data validation, and integration of SISWASKEUDES into all stages of the performance audit process are required.

Keywords: *SISWASKEUDES, Performance Audit, COBIT 5, Information Technology Governance, APIP, Village Financial and Asset Management.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) dalam mendukung pelaksanaan Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi ditinjau berdasarkan kerangka COBIT 5. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada 20 orang APIP yang pernah terlibat dalam pelaksanaan Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dengan menggunakan SISWASKEUDES serta wawancara terhadap tiga orang narasumber yang memiliki pengalaman dalam penerapan aplikasi. Data

kuesioner dianalisis berdasarkan nilai rata-rata pada tujuh aspek penelitian, sedangkan hasil wawancara digunakan untuk memperdalam dan mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan domain yang relevan dalam COBIT 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SISWASKEUDES telah memberikan manfaat dalam penyediaan data, dokumentasi, efisiensi waktu, dan mendukung pelaksanaan audit kinerja. Namun, pemanfaatannya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara optimal dalam seluruh siklus audit. Tahap pengumpulan data telah terbantu oleh sistem, sedangkan proses analisis, penyusunan kertas kerja, dan pelaporan masih banyak dilakukan secara manual. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan kompetensi dan pelatihan auditor, kualitas dan validitas data yang belum konsisten dengan kondisi lapangan, gangguan dan keterbatasan teknis aplikasi, keterbatasan fitur analisis, serta masih dominannya proses manual. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa optimalisasi SISWASKEUDES tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan sistem, tetapi juga oleh persepsi, sikap, kesiapan, dan kemampuan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kebijakan penggunaan aplikasi, peningkatan stabilitas dan kemudahan sistem, pengembangan fitur analisis audit, penguatan validasi data, serta integrasi SISWASKEUDES dengan seluruh tahapan audit kinerja.

Kata kunci: SISWASKEUDES, Audit Kinerja, COBIT 5, Tata Kelola Teknologi Informasi, APIP, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi (TI dan SI) dalam pemerintahan baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa dilakukan melalui pengintegrasian aplikasi dalam proses bisnis organisasi sebagai bagian dari implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendorong lembaga pengawasan untuk beradaptasi dan melakukan transformasi metode audit kinerja berbasis teknologi informasi. Setiap tingkatan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara transparan dan akuntabel demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dalam pengelolaan keuangan pemerintahan desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan agar desa dapat mengelola pemerintahannya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki, merencanakan pembangunan desa serta mengelola keuangan dan kekayaan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kerap kali meningkat setiap tahunnya mendorong optimalisasi peranan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 4 menyatakan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa di daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh APIP Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan (camat).

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) mendorong auditor untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapi era digital dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, auditor APIP perlu memahami dan memanfaatkan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau *Computer Assisted Audit Techniques* (CAAT) dalam pelaksanaan audit. Melalui teknik ini, auditor dapat mengakses, mengolah, menganalisis, dan mengevaluasi data elektronik secara lebih efektif. Penggunaan TABK telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2011) PSA No. 59 SA Seksi 327 dan berperan penting dalam mendukung proses audit, mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi hasil audit, dengan tetap memperhatikan penerapan prosedur audit yang tepat.

Namun, pada pelaksanaannya APIP Kabupaten/Kota masih terkendala untuk melakukan pengawasan dikarenakan jumlah SDM pemeriksa yang terbatas. Sebagai pengimplementasian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 73 tahun 2020 maka dibangun suatu sistem pengawasan yang terintegrasi yaitu aplikasi SISWASKEUDES.

Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) merupakan sebuah *tools* hasil pengembangan secara bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan BPKP dengan mengacu pada Permendagri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi ini digunakan oleh APIP daerah dalam kegiatan pemeriksaan dan pengawasan keuangan desa dengan pendekatan berbasis risiko dan TABK sehingga bermanfaat dalam menentukan desa prioritas sebagai objek pemeriksaan; merumuskan peta permasalahan sebagai dasar Tindakan selanjutnya; menghemat sumber daya pemeriksaan; menghasilkan kertas kerja pemeriksaan dan template laporan hasil pemeriksaan secara otomatis dan terstandar; pendokumentasian proses dan hasil pemeriksaan yang lebih tertib dan rapi; dan sebagai *dashboard* informasi hasil pengawasan. Ruang lingkup Pengelolaan Pengawasan Keuangan Desa yang dilakukan oleh APIP daerah kabupaten/kota berdasarkan Permendagri 73 tahun 2020 terdiri atas 8 area pengawasan yaitu: (a) evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa lingkup daerah kabupaten/kota; (b) pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa; (c) pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa; (d) reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa mengenai APB Desa, termasuk konsistensi dengan RKP Desa; (e) reviu atas kualitas belanja Desa; (f) reviu pengadaan barang dan jasa di Desa; (g) pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa; dan (h) Pemeriksaan Investigatif. Namun, aplikasi SISWASKEUDES baru mengakomodir lingkup pengawasan berupa Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 97 Tahun 2012 tentang Struktur dan Tata Kerja Inspektorat bahwasannya Inspektorat Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta mengawasi pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan

pelaksanaan urusan pemerintahan desa salah satunya kaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa. Setiap tahunnya Inspektorat Kabupaten Sukabumi menyusun lingkup kegiatan *assurance* dan *consulting* pada dokumen PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), salah satunya kaitan dengan Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Secara administratif Kabupaten Sukabumi memiliki 47 kecamatan yang terdiri dari 381 desa serta 5 kelurahan. Jumlah objek pengawasan yang begitu banyak tidak sebanding dengan jumlah APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yaitu sejumlah 47 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel Jumlah APIP Inspektorat Kabupaten Sukabumi s.d. Mei 2025

No	Jabatan Pemeriksa	Jumlah
(1)	(2)	(2)
	Auditor	24
1	Auditor Madya	3
2	Auditor Muda	5
3	Auditor Pertama	8
4	Auditor Terampil	8
	PPUPD	22
1	PPUPD Madya	3
2	PPUPD Muda	13
3	PPUPD Pertama	6
Jumlah		46

Sumber: Diolah penulis dari Inspektorat Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah APIP Inspektorat Kabupaten Sukabumi terdiri dari 24 orang Auditor dan 22 orang PPUPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah). Jika dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan yaitu sebanyak 381 desa dan 5 kelurahan, maka masing-masing APIP akan memegang kurang lebih 8 objek pengawasan. Sebagai wujud pengimplementasian pengawasan keuangan desa yang efisien dan efektif sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 26 ayat (1) bahwasannya APIP Kementerian, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota, menyampaikan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa, maka Inspektorat Kabupaten Sukabumi melaksanakan kegiatan pengawasan dengan menggunakan aplikasi SISWASKEUDES (Sistem Pengawasan Keuangan Desa).

Berdasarkan penelitian (Miranti, 2019) bahwa jika dilihat dari peranan dan fungsi TI yang sanga erat dengan pelaksanaan proses bisnis suatu organisasi, maka diperlukan suatu tata kelola teknologi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi TI dan SI secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset desa melalui teknologi informasi/sistem serta dapat mengelola risiko yang berkaitan dengan teknologi informasi.

Tata kelola informasi berfokus pada penetapan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan, pengaturan mekanisme, prosedur pelaksanaan dan pemantauan keputusan tersebut, serta penentuan jenis keputusan yang diperlukan guna memastikan tercapainya keselarasan antara strategi bisnis dan teknologi informasi melalui pemanfaatan TI yang optimal dan efektif (Bernandus, 2013). Diperjelas oleh (Alreemy et al., 2016) bahwa tata kelola teknologi informasi merupakan suatu proses yang memandu, mengelola investasi serta keputusan yang berhubungan dengan teknologi informasi untuk mencapai tujuan.

Pernyataan (Kuyanti dkk., 2023) atas penelitian (Bambang, 2012) menjelaskan bahwa suatu sistem informasi diperlukan analisis manajerial terkait teknologi informasinya, analisis tingkat kematangan yang dilakukan untuk mengetahui kematangan tata kelola TI yang diperoleh melalui kuesioner, interview, dan standar yang ditetapkan COBIT untuk mengetahui bahwa SI tersebut sudah bekerja sesuai dengan yang direncanakan. Analisis tingkat kematangan dilakukan dengan memproses data dari hasil pengisian kuesioner *maturity model* oleh para responden dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada setiap level *control objective* yang terdapat dalam Domain *Delivery and Support* (DS).

Untuk mencapai tingkat kematangan yang diharapkan (*expected maturity level*) pada tingkatan *managed and measurable* (level 4), seluruh prosedur yang disyaratkan pada masing-masing proses harus terpenuhi. Hal ini mencakup penyusunan perencanaan strategis TI, perancangan arsitektur informasi, penetapan arah pengembangan teknologi, perumusan proses serta struktur dan hubungan organisasi TI, pengelolaan investasi TI, penyampaian tujuan dan arahan manajemen, pengelolaan sumber daya manusia TI, pengendalian mutu, penilaians erta mitigasi risiko TI, dan manajemen proyek TI (Kuryanti dkk., 2023).

Secara umum, pelaksanaan audit dengan menggunakan aplikasi dirasa cukup efektif dan efisien melihat dari *benefit* yang diberikan. Lebih jauh, *benefit* tersebut seharusnya menjadi pendorong bagi auditor untuk berpartisipasi aktif secara simultan dalam memanfaatkan aplikasi audit, sehingga proses pengawasan dan pengendalian dapat berjalan lebih optimal serta menghasilkan kualitas audit yang lebih komprehensif. Sejalan dengan (Maryani, N et al., 2023) yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dengan menggunakan bantuan teknologi informasi yang dibarengi dengan pengalaman auditor akan meningkatkan kualitas hasil audit.

Namun, berdasarkan pengalaman dan fenomena yang terjadi pada pelaksanaan Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dengan berbantuan SISWASKEUDES di Inspektorat Kabupaten Sukabumi, APIP cenderung belum memanfaatkan fitur yang tersedia secara maksimal. Penggunaan aplikasi lebih banyak terbatas pada pengambilan data yang dibutuhkan saja, sementara proses pengujian maupun penyusunan kertas kerja audit masih dilakukan secara manual. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi manfaat aplikasi dengan praktik penggunaannya di lapangan.

Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara bersama pegawai Inspektorat yang secara langsung memanfaatkan SISWAKSEUDES dalam pelaksanaan Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, ditemukan sejumlah hambatan yang dihadapi pada pemanfaatan aplikasi secara optimal oleh APIP. Hambatan tersebut, apabila tidak segera diatasi, berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan audit kinerja dan pengimplementasian kebijakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 73 tahun 2020.

Adapun hambatan tersebut dimulai dari proses masuk ke dalam aplikasi yang seringkali mengalami kendala/*error*. Ketika APIP mengakses aplikasi SISWASKEUDES untuk melakukan pengawasan berupa audit kinerja, sistem akan memunculkan pengendalian dimana pengguna harus menginput *username* dan *password* yang sesuai agar bisa masuk. Namun, sistem seringkali salah membaca sehingga ketika berhasil masuk halaman yang ditampilkan adalah milik pemerintah daerah lain sehingga harus *log out* berulang kali.

Kemudian, sistem yang tidak bisa digunakan secara fleksibel. Penggunaan aplikasi SISWASKEUDES dirancang untuk mempermudah pengerjaan serta penyamaan format kertas kerja yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Namun, sistem harus selalu terhubung dengan internet dan seringkali *loading* dengan waktu yang lama, serta jika sudah melebihi *time out* maka sistem akan tertutup dengan sendirinya sehingga APIP harus mengulang dari awal untuk proses masuk tersebut. Hal ini dirasa kurang efektif karena kerap kali harus keluar masuk ke dalam sistem.

Selanjutnya, keterbatasan penuangan narasi hasil temuan pengawasan. Aplikasi SISWASKEUDES menyediakan fitur untuk menuangkan hasil temuan pemeriksaan pada menu kertas kerja. Temuan atas pemeriksaan harus diungkap secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar terhindar dari bias. Namun, terbatasnya karakter yang dapat diinput pada sistem menjadi kendala dalam proses penuangan temuan sehingga auditor tidak dapat leluasa dalam menungkan temuan hasil audit tersebut.

Eksplorasi data yang terbatas menjadi hambatan selanjutnya dalam pelaksanaan audit menggunakan aplikasi SISWASKEUDES. APIP seringkali membutuhkan data/informasi objek pengawasan baik tahun berjalan maupun lintas tahun pada sistem tersebut seperti realisasi anggaran belanja dan pendapatan, perpajakan, penatuausahaan aset dan lain sebagainya. Namun, APIP tidak dapat mengakses informasi tersebut secara lintas tahun dan hanya dapat mengakses sesuai tahun anggaran penugasan berdasarkan surat tugas. Untuk memberikan keyakinan yang memadai, tentu dibutuhkan akses informasi yang tidak sedikit, namun dengan adanya keterbatasan akses terhadap informasi tersebut kerap menghambat pemeriksa dalam penugasan karena harus selalu minta dokumen kepada desa/objek pemeriksaan.

Hambatan lainnya adalah terdapat Auditor/pengawas yang belum mahir menggunakan aplikasi SISWASKEUDES sehingga memperlambat proses audit. Penelitian (Mulyandini, V. C., & Anggionaldi, M, 2025) menjelaskan bahwasannya

kompetensi teknologi informasi, analisis data, dan pemanfaatan AI menjadi elemen baru dalam keahlian auditor. Perpaduan integritas, kompetensi dan penguasaan teknologi informasi dapat menghasilkan audit yang adaptif, akuntabel, serta relevan dengan tantangan modern.

Melihat berbagai permasalahan dan hambatan yang telah diuraikan, diperlukan suatu konsep atau kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas penggunaan aplikasi SISWASKEUDES dalam mendukung pelaksanaan audit kinerja atas pengelolaan keuangan dan aset desa.

Penelitian yang dilakukan (Miranti, 2019) mengemukakan bahwa pada proses tata kelola teknologi informasi terdapat beberapa *framework* yang dapat dijadikan pedoman yaitu, *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL), *International Standards Organization* (ISO), dan *Control Objective for Information and related Technology* (COBIT). *Framework* ITIL berfokus pada *customer*, ISO berfokus pada pengukuran mutu organisasi, dan COBIT digunakan dalam evaluasi manajemen TI.

Dari ketiga *framework* tersebut, COBIT 5 dirasa sudah mencakup beberapa konsep/*framework* lain dan memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengevaluasi permasalahan. Miranti (2019) mengemukakan perbandingan tersebut merujuk pada (ISACA, 2012) yaitu:

- a. ISO/EIC 38500 (masuk dalam area tata kelola pada domain EDM)
- b. ITIL V3 2011 dan ISO/EIC 20000 (masuk dalam area manajemen domain APO, BAI, DSS)
- c. ISO/IEC 27000 *series* (masuk dalam area manajemen domain APO dan DSS kaitan dengan proses yang berhubungan dengan keamanan manajemen risiko, dan domain MEA untuk aktivitas pengawasan dan evaluasi)
- d. ISO/IEC 31000 *series* (masuk dalam area tata kelola domain EDM dan area manajemen APO pada proses yang berhubungan dengan manajemen risiko)
- e. PRINCE 2 (masuk dalam area manajemen domain APO pada proses yang berhubungan dengan portofolio dan domain BAI pada proses yang berhubungan dengan manajemen proyek dan program)

Darmawan & Dwiharto (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *framework* COBIT 5 dirancang untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuan tata kelola dan pengelolaan teknologi informasi. Pendekatan yang digunakan dalam COBIT 5 berfokus pada pencapaian nilai optimal dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dengan tetap menjaga keseimbangan antara manfaat yang diperoleh, risiko yang ditimbulkan, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya informasi. COBIT 5 terdiri dari lima domain utama yang mencakup total 37 proses tata kelola TI. Kelima domain tersebut meliputi: *Evaluate, Direct and Monitor (EDM)*; *Align, Plan and Organize (APO)*; *Build, Acquire and Implement (BAI)*; *Deliver, Service and Support (DSS)*; serta *Monitor, Evaluate and Assess (MEA)*.

Seperti (Jayanti & Supriatna, 2024) yang melakukan evaluasi tata kelola SIPD pada Bappeda Provinsi Jawa Barat menggunakan *framework* COBIT 5 untuk mengetahui *IT maturity level* tata kelola SIPD yang dapat menjadi acuan Bappeda Provinsi Jawa barat dalam peningkatan kinerja serta hambatan yang dihadapi

sehingga menemukan solusi yang tepat. Penelitian (Kuryanti dkk., 2023) kaitan dengan evaluasi peningkatan tata Kelola teknologi informasi dengan menggunakan framework COBIT 5 yang berfokus pada domain MEA01 (*Monitor and Evaluate Performance and Conformance*), MEA02 (*Monitor The System of Internal Control*), MEA03 (*Monitor and Evaluate Compliance with External Requirements*) dan penelitian lainnya kaitan dengan evaluasi IT menggunakan *framework* COBIT 5.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, diperlukan analisis terhadap efektivitas pemanfaatan aplikasi SISWASKEUDES dalam mendukung pelaksanaan audit kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa oleh APIP. Pada penelitian ini tidak bertujuan untuk mengevaluasi aspek teknis maupun infrastruktur aplikasi SISWASKEUDES, melainkan untuk mengidentifikasi sejauh mana aplikasi tersebut dimanfaatkan dalam proses audit serta menemukan penyebab utama yang menghambat pemanfaatannya secara optimal. Dalam penelitian ini, *framework* COBIT 5 digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengelompokkan permasalahan yang ditemukan ke dalam domain yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan untuk selanjutnya dirumuskan rekomendasi perbaikan yang tepat dalam rangka meningkatkan pemanfaatan SISWASKEUDES.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun sebuah penelitian, peneliti perlu menetapkan metode yang sesuai untuk digunakan. Pemilihan metode penelitian bertujuan agar pelaksanaan studi dapat dilakukan secara tepat dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Sugiyono (2013, hlm.2) memberikan pendapat mengenai pengertian metode penelitian yaitu: “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kat a kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.”

Selain itu, Menurut Garaika & Darmanah (2019, hlm. 1) mengemukakan bahwa: “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri – ciri keilmuan (pengetahuan) yaitu rasional empiris dan sistematis.”

Selanjutnya adalah jenis data. Menurut Garaika & Darmanah (2019, hlm. 3) menjelaskan bahwa: “Jenis data dan analisisnya dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data kualitatif dan kuantitatif, pada suatu proses penelitian sering hanya mendapatkan satu jenis data saja yaitu kualitatif atau kuantitatif saja, tetapi mungkin juga ada keduanya.” Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pemanfaatan SISWASKEUDES

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) telah digunakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam mendukung pelaksanaan audit kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa. Penelitian melibatkan 20 orang APIP yang terdiri atas auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), serta tiga informan yang memiliki pengalaman langsung dalam penggunaan SISWASKEUDES. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengombinasikan hasil kuesioner dan wawancara serta memetakan temuan ke dalam domain COBIT 5.

Secara umum, SISWASKEUDES telah memberikan manfaat terutama dalam memperoleh data dan dokumen pemeriksaan secara lebih cepat dan terstruktur. Sistem juga telah menyediakan sejumlah fitur pendukung, seperti kertas kerja dan template laporan hasil pemeriksaan. Namun, pemanfaatannya belum sepenuhnya terintegrasi dengan seluruh siklus audit. SISWASKEUDES lebih banyak digunakan sebagai sarana penyediaan data dan dokumentasi awal, sedangkan proses analisis, pengolahan data, penyusunan kertas kerja, dan pelaporan masih dilakukan secara manual dengan bantuan aplikasi lain seperti Microsoft Excel dan Word. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi sistem yang diharapkan dengan praktik pemanfaatannya di lapangan.

Temuan tersebut menjadi penting apabila dikaitkan dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi dalam audit. Sistem informasi tidak hanya diharapkan mampu menyediakan data, tetapi juga mendukung proses pengolahan informasi, analisis, dokumentasi, pengambilan keputusan, dan monitoring secara terintegrasi. Dengan demikian, efektivitas SISWASKEUDES tidak cukup dinilai dari keberadaan sistem dan tingkat penggunaannya, tetapi juga dari sejauh mana sistem mampu mendukung keseluruhan proses audit kinerja.

Sumber Daya Manusia sebagai Faktor Penentu Pemanfaatan SISWASKEUDES

Aspek pertama yang dianalisis adalah sumber daya manusia auditor. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa pemahaman auditor terhadap fitur dan fungsi SISWASKEUDES relatif baik dengan nilai rata-rata 4,21. Kompetensi teknologi informasi auditor memperoleh nilai 3,70, sedangkan aspek pelatihan penggunaan SISWASKEUDES memperoleh nilai 3,55. Di sisi lain, kesulitan dalam menginterpretasikan output sistem memperoleh nilai 3,05 dan keterbatasan kemampuan SDM memperoleh nilai 4,20. Hasil tersebut menunjukkan bahwa auditor secara umum telah mampu menggunakan sistem, tetapi belum seluruhnya memiliki kemampuan untuk memanfaatkan fitur aplikasi secara mendalam.

Temuan wawancara memperkuat hasil kuesioner. Auditor telah mampu menggunakan SISWASKEUDES untuk memperoleh dan mengelola data pemeriksaan, tetapi tingkat penguasaan fitur berbeda antar auditor. Sebagian auditor masih terbatas pada fitur dasar. Keterbatasan pelatihan khusus menyebabkan kemampuan penggunaan aplikasi banyak diperoleh melalui pengalaman, pembelajaran mandiri,

dan pendampingan dari rekan kerja. Akibatnya, fitur analisis, kertas kerja, dan penyusunan hasil pemeriksaan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam perspektif COBIT 5, kondisi tersebut berkaitan terutama dengan APO07 (Manage Human Resources). Pemanfaatan teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi pengguna. Sistem yang memiliki fungsi relatif memadai tidak akan menghasilkan manfaat optimal apabila pengguna belum mempunyai kompetensi untuk memanfaatkan fitur tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu, persoalan pemanfaatan SISWASKEUDES tidak semata-mata merupakan persoalan teknologi, tetapi juga persoalan kesiapan sumber daya manusia.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa pelatihan perlu diarahkan bukan hanya pada kemampuan operasional dasar, tetapi pada kemampuan analitis. Auditor perlu memahami bagaimana output SISWASKEUDES digunakan untuk mengidentifikasi risiko, menguji bukti, menilai kinerja, serta menyusun kesimpulan audit. Dengan demikian, peningkatan kompetensi perlu diarahkan pada penggunaan aplikasi sebagai instrumen audit, bukan sekadar sebagai media pencarian data.

Kualitas Data dan Keandalan Sistem Input

Aspek kualitas data menunjukkan bahwa data keuangan dan aset desa yang tersedia dalam SISWASKEUDES dinilai cukup lengkap dengan nilai rata-rata 3,90. Akan tetapi, ketidaksesuaian antara data dalam sistem dan kondisi lapangan juga memperoleh nilai 3,90. Sementara itu, proses input data oleh pemerintah desa memperoleh nilai 4,50 yang menunjukkan bahwa responden sangat menilai proses input sebagai faktor yang memengaruhi keandalan hasil audit. Validasi data memperoleh nilai 3,80, sedangkan kualitas data sebagai kendala dalam analisis value for money memperoleh nilai 3,70.

Hasil tersebut menunjukkan adanya paradoks antara kelengkapan data dan validitas data. Data yang tersedia dalam sistem relatif lengkap, tetapi kelengkapan belum otomatis menjamin kesesuaian dengan kondisi sebenarnya. Auditor masih menemukan perbedaan antara data dalam SISWASKEUDES dengan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, data yang tersedia tetap membutuhkan proses verifikasi dan pengujian lebih lanjut.

Temuan tersebut relevan dengan domain APO03 (Manage Enterprise Architecture), MEA01 (Monitor Performance and Conformance), DSS06 (Manage Business Process Controls), dan APO11 (Manage Quality). Dari perspektif tata kelola TI, kualitas informasi merupakan salah satu prasyarat utama agar sistem dapat menghasilkan manfaat bagi organisasi. Apabila data input tidak akurat, maka proses analisis yang dilakukan berdasarkan data tersebut berpotensi menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat.

Dengan demikian, efektivitas SISWASKEUDES perlu dilihat tidak hanya dari sisi kemampuan sistem menyimpan data, tetapi juga dari mekanisme pengendalian kualitas data. Pemutakhiran data, validasi, koordinasi antarinstansi, dan verifikasi lapangan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam audit mencerminkan kondisi sebenarnya. Penelitian menunjukkan bahwa

SISWASKEUDES telah menyediakan data yang mendukung audit, tetapi kualitas dan validitas data masih perlu diperkuat.

Keandalan Sistem dan Kendala Teknis Aplikasi

Keandalan teknis merupakan aspek yang turut memengaruhi efektivitas penggunaan SISWASKEUDES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan atau error aplikasi memperoleh nilai rata-rata 3,70. Kecepatan respons sistem memperoleh nilai 4,45, gangguan teknis yang menghambat penyusunan kertas kerja memperoleh nilai 4,25, dukungan teknis yang belum optimal memperoleh nilai 4,20, dan stabilitas sistem memperoleh nilai 4,20.

Nilai tersebut memperlihatkan bahwa persoalan teknis bukan sekadar masalah kenyamanan penggunaan, tetapi telah berdampak terhadap produktivitas auditor. Hasil wawancara menunjukkan adanya waktu pemuatan aplikasi yang relatif lama, gangguan ketika mengakses atau memuat data dalam jumlah besar, serta kendala dalam penyimpanan dan pemindahan dokumen hasil pemeriksaan. Dukungan admin atau operator tersedia, tetapi dalam kondisi tertentu penanganan gangguan masih membutuhkan waktu.

Dalam kerangka COBIT 5, temuan ini berhubungan dengan DSS02 (Manage Service Requests and Incidents), DSS01 (Manage Operations), dan BAI04 (Manage Availability and Capacity). Ketika sistem mengalami gangguan atau memiliki waktu respons yang rendah, auditor dapat kembali menggunakan prosedur manual. Kondisi tersebut berpotensi memperlemah tujuan digitalisasi karena sebagian pekerjaan yang seharusnya dilakukan melalui sistem justru berpindah kembali ke luar sistem.

Dengan demikian, peningkatan stabilitas, responsivitas, dan layanan dukungan teknis menjadi salah satu kebutuhan penting. Pengembangan sistem perlu diarahkan pada terciptanya aplikasi yang tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diandalkan ketika digunakan dalam proses audit dengan beban data dan kebutuhan dokumentasi yang relatif tinggi.

Keterbatasan Integrasi SISWASKEUDES dalam Proses Audit Kinerja

Temuan paling penting penelitian terdapat pada aspek integrasi SISWASKEUDES dengan proses audit kinerja. Nilai rata-rata menunjukkan bahwa dukungan aplikasi terhadap tahapan audit memperoleh nilai 3,40. Kesulitan menghubungkan output sistem dengan indikator kinerja memperoleh nilai 3,60. Dukungan terhadap analisis value for money memperoleh nilai 3,95, proses manual di luar sistem memperoleh nilai 3,90, sedangkan integrasi dengan metodologi audit memperoleh nilai 4,15.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa SISWASKEUDES belum berfungsi sebagai platform utama dalam keseluruhan siklus audit kinerja. Aplikasi telah membantu pada tahap perencanaan, pengumpulan data, penelusuran informasi, dan penyediaan dokumen maupun program kerja audit. Namun, pada tahap analisis ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E), pengolahan data, penyusunan kertas kerja, dan penyusunan kesimpulan audit, auditor masih membutuhkan proses manual.

Keterbatasan tersebut juga terlihat dari ruang pengisian kertas kerja dan fitur analisis yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan auditor. Auditor masih harus melakukan pengolahan data serta penyusunan dokumentasi menggunakan Excel atau Word.

Dalam perspektif COBIT 5, kondisi ini berkaitan dengan DSS01 (Manage Operations), MEA01 (Monitor Performance and Conformance), dan APO02 (Manage Strategy). Sistem informasi seharusnya mampu mendukung proses bisnis organisasi secara end-to-end. Ketika aplikasi hanya digunakan pada tahap pengumpulan data sementara proses analisis dan pelaporan dilakukan di luar sistem, maka tingkat integrasi sistem terhadap proses bisnis masih rendah.

Temuan ini merupakan salah satu kontribusi penting penelitian karena menunjukkan bahwa digitalisasi audit tidak otomatis menghasilkan audit yang terdigitalisasi secara menyeluruh. Penggunaan aplikasi sebagai sumber data belum dapat disamakan dengan transformasi proses audit berbasis teknologi informasi. Transformasi baru dapat dikatakan lebih matang apabila sistem mampu menghubungkan data, prosedur audit, analisis, bukti, kertas kerja, temuan, pelaporan, dan monitoring tindak lanjut dalam satu alur yang terintegrasi.

Dukungan SISWASKEUDES terhadap Pengendalian dan Kepatuhan

Pada aspek pengendalian dan kepatuhan akuntansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan SISWASKEUDES terhadap pengujian kepatuhan regulasi memperoleh nilai 3,45. Dukungan terhadap pengujian pengendalian internal memperoleh nilai 3,80, pemanfaatan audit trail memperoleh nilai 3,95, identifikasi potensi penyimpangan memperoleh nilai 3,90, dan keyakinan terhadap kewajaran pengelolaan keuangan dan aset memperoleh nilai 3,85.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa SISWASKEUDES telah membantu proses pengawasan, tetapi belum memberikan dukungan yang optimal dalam menghasilkan assurance audit. Nilai terendah pada aspek pengujian kepatuhan regulasi menunjukkan bahwa sistem masih memiliki keterbatasan dalam membantu auditor menghubungkan data transaksi dengan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa.

Hal yang sama terlihat pada pemanfaatan audit trail. Meskipun fitur tersebut tersedia, pemanfaatannya belum maksimal. Auditor masih melakukan pengujian manual terhadap data yang diperoleh dari SISWASKEUDES untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi lapangan dan bukti pendukung.

Dalam perspektif COBIT 5, temuan tersebut terutama berkaitan dengan MEA02 (Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control) dan DSS06 (Manage Business Process Controls). Sistem seharusnya tidak hanya menjadi tempat penyimpanan informasi, tetapi juga mendukung pengendalian internal, penelusuran aktivitas, dan identifikasi penyimpangan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas audit berbasis TI memerlukan penguatan fungsi pengendalian dalam sistem. Pemanfaatan audit

trail, validasi otomatis, penanda risiko, dan mekanisme pengujian kepatuhan dapat dikembangkan agar auditor tidak sepenuhnya bergantung pada pemeriksaan manual.

Persepsi Auditor terhadap Efektivitas Pemanfaatan SISWASKEUDES

Secara umum, auditor memberikan penilaian positif terhadap manfaat SISWASKEUDES. Efisiensi waktu audit memperoleh nilai 4,00 dan peningkatan kualitas hasil audit memperoleh nilai 3,95. Namun, pernyataan bahwa pemanfaatan sistem belum optimal memperoleh nilai 4,05. Kebutuhan peningkatan sistem dan kebijakan memperoleh nilai tertinggi, yaitu 4,50, sedangkan pemenuhan kebutuhan auditor memperoleh nilai 3,80.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat dualitas persepsi auditor. Di satu sisi, SISWASKEUDES dipandang bermanfaat dan mampu meningkatkan efisiensi. Di sisi lain, auditor mengakui bahwa sistem belum memenuhi seluruh kebutuhan pelaksanaan audit kinerja.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas teknologi informasi tidak dapat hanya diukur berdasarkan keberadaan dan manfaat sistem. Efektivitas juga berkaitan dengan kemampuan sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung proses bisnis secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, manfaat SISWASKEUDES telah dirasakan terutama pada aspek akses data dan dokumentasi, tetapi manfaat tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi dukungan terhadap analisis dan pengambilan keputusan audit.

Dengan demikian, peningkatan efektivitas harus dilakukan secara simultan melalui dua sisi, yaitu perbaikan sistem dan peningkatan kesiapan pengguna. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa optimalisasi SISWASKEUDES dipengaruhi oleh persepsi, sikap, dan kemampuan pengguna. Sistem dipandang bermanfaat, tetapi belum sepenuhnya mudah digunakan; dukungan organisasi telah tersedia, tetapi penerimaan dan kemampuan pengguna belum seragam.

Kebijakan dan Tata Kelola Pemanfaatan SISWASKEUDES

Aspek kebijakan menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan beberapa aspek lainnya. Keberadaan kebijakan formal memperoleh nilai 3,90, keselarasan kebijakan dengan regulasi memperoleh nilai 4,00, kebijakan sebagai pedoman audit memperoleh nilai 4,15, sosialisasi kebijakan memperoleh nilai 4,00, dan kewajiban penggunaan SISWASKEUDES pada tahap audit memperoleh nilai 3,95.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan organisasi terhadap penggunaan SISWASKEUDES sebenarnya telah tersedia. Pimpinan telah memberikan arahan dan mendorong penggunaan sistem dalam pelaksanaan audit. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi mekanisme operasional yang terukur. Belum terdapat SOP khusus, komitmen tertulis yang lebih rinci, maupun indikator kinerja yang secara spesifik mengukur tingkat pemanfaatan SISWASKEUDES pada setiap tahapan audit. Selain itu, belum terintegrasinya SISWASKEUDES dengan SIPADES juga menjadi kendala dalam pengelolaan data aset desa.

Dalam kerangka COBIT 5, kondisi ini berkaitan dengan EDM01 (Ensure Governance Framework Setting and Maintenance), EDM02 (Ensure Benefits Delivery), dan APO01 (Manage the IT Management Framework). Tata kelola yang efektif tidak berhenti pada penerbitan kebijakan, tetapi harus memastikan adanya struktur, prosedur, target, indikator, dan mekanisme monitoring yang dapat mengarahkan pemanfaatan TI menuju tujuan organisasi.

Oleh karena itu, kebijakan penggunaan SISWASKEUDES perlu diperkuat melalui SOP, target pemanfaatan, indikator kinerja, mekanisme evaluasi, serta pembagian tanggung jawab yang jelas. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat menjadi instrumen pengendalian terhadap implementasi sistem.

Sintesis Temuan Berdasarkan Kerangka COBIT 5

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, terdapat tiga kelompok persoalan utama dalam pemanfaatan SISWASKEUDES. Pertama, faktor pengguna, yang meliputi keterbatasan kompetensi, pelatihan, dan kemampuan interpretasi output sistem. Kedua, faktor sistem, yang meliputi kualitas data, gangguan teknis, keterbatasan fitur analisis, keterbatasan kertas kerja, dan belum optimalnya integrasi sistem. Ketiga, faktor tata kelola, yang meliputi kebutuhan penguatan kebijakan, SOP, indikator kinerja, dan mekanisme monitoring implementasi.

Ketiga kelompok tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pemanfaatan SISWASKEUDES bersifat multidimensional. Persoalan tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbaiki aplikasi. Pengembangan sistem tanpa peningkatan kompetensi auditor berpotensi menghasilkan sistem yang tetap kurang dimanfaatkan. Sebaliknya, peningkatan kompetensi tanpa perbaikan fitur dan stabilitas sistem juga tidak akan menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

Dari perspektif COBIT 5, temuan penelitian menunjukkan perlunya keterkaitan antara APO07 untuk penguatan sumber daya manusia, DSS01 dan DSS02 untuk penguatan operasional dan layanan teknis, DSS06 untuk pengendalian proses bisnis, MEA01 dan MEA02 untuk monitoring dan pengendalian, serta EDM01 dan EDM02 untuk penguatan tata kelola dan pencapaian manfaat TI. Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi SISWASKEUDES membutuhkan pendekatan tata kelola yang terintegrasi, bukan intervensi pada satu aspek saja.

Implikasi Penelitian dan Arah Pengembangan SISWASKEUDES

Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa pengembangan SISWASKEUDES perlu diarahkan dari sistem yang berfungsi sebagai data repository dan alat dokumentasi menuju sistem yang mampu mendukung end-to-end performance audit. Pengembangan fitur perlu mencakup analisis ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E), pengolahan data, penyusunan kertas kerja, pengembangan temuan, pelaporan hasil pemeriksaan, dan monitoring tindak lanjut.

Pengembangan tersebut juga perlu memperkuat mekanisme validasi data serta integrasi antarsistem. Integrasi dengan sistem pengelolaan aset desa menjadi

penting karena kualitas audit pengelolaan keuangan dan aset sangat bergantung pada konsistensi data yang digunakan auditor.

Dari sisi organisasi, Inspektorat perlu membangun mekanisme peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Pelatihan sebaiknya menggunakan pendekatan praktik langsung dan berbasis kasus audit sehingga auditor tidak hanya memahami cara menggunakan fitur, tetapi juga mampu menginterpretasikan output untuk kepentingan analisis audit.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan SISWASKEUDES tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi, tetapi oleh kesesuaian antara teknologi, kompetensi pengguna, kualitas data, proses audit, dan tata kelola organisasi. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi digitalisasi dan tingkat integrasi aktual dalam pelaksanaan audit kinerja di Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa SISWASKEUDES telah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan efisiensi akses data dan dokumentasi audit, tetapi belum sepenuhnya mampu menjadi platform utama dalam seluruh siklus audit kinerja. Pemanfaatan masih bersifat parsial karena analisis, penyusunan kertas kerja, dan pelaporan masih banyak dilakukan secara manual. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi dan pelatihan auditor, kualitas data, kendala teknis, keterbatasan fitur analisis, serta belum optimalnya penguatan tata kelola dan kebijakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan SISWASKEUDES memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan audit kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa, tetapi efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal. SISWASKEUDES membantu auditor dalam memperoleh, mengelola, dan menelusuri data serta dokumen keuangan desa sehingga proses pengumpulan informasi menjadi lebih cepat dan terstruktur dibandingkan apabila dilakukan secara manual. Namun, beberapa tahapan audit masih dilakukan di luar aplikasi, khususnya pengujian dan verifikasi data, analisis aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E), pengolahan data lanjutan, penyusunan kertas kerja, serta penyusunan uraian temuan dan kesimpulan audit yang masih banyak menggunakan Excel, Word, atau dokumen manual.
2. Pemanfaatan SISWASKEUDES oleh auditor masih bersifat parsial. SISWASKEUDES lebih berfungsi sebagai alat bantu dalam penyediaan data dan dokumentasi awal audit daripada sebagai sistem yang mendukung seluruh siklus audit secara terintegrasi seperti pengumpulan data, sementara pada tahap analisis, penyusunan kertas kerja, dan pelaporan masih dilakukan secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa sistem belum terintegrasi secara penuh dalam seluruh siklus audit kinerja.

3. Pemanfaatan SISWASKEUDES didukung oleh ketersediaan data yang cukup lengkap, persepsi manfaat dalam meningkatkan efisiensi waktu dan kualitas audit, serta adanya kebijakan formal yang mengatur penggunaannya. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala, seperti kompetensi SDM dan pelatihan yang belum memadai, kualitas data yang belum konsisten dengan kondisi lapangan, keterbatasan fitur analisis audit dalam sistem, kendala teknis aplikasi, serta masih dominannya proses manual di luar sistem.
4. Tujuan SISWASKEUDES adalah mendukung audit kinerja berbasis teknologi secara efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan, di mana sistem belum digunakan secara maksimal dalam proses analisis dan pengambilan keputusan audit. Kesenjangan ini disebabkan oleh keterbatasan sistem dan kesiapan pengguna.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SISWASKEUDES dipengaruhi oleh faktor persepsi, sikap, dan kemampuan pengguna. Dari sisi TAM, sistem dinilai bermanfaat namun belum sepenuhnya mudah digunakan sehingga memengaruhi tingkat penggunaannya. Berdasarkan TRA, meskipun secara organisasi sudah ada dukungan penggunaan sistem, sikap auditor belum sepenuhnya menerima. Sementara itu, dalam TPB, keterbatasan kemampuan serta kendala teknis memengaruhi kemampuan auditor dalam mengoperasikan sistem. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi penggunaan SISWASKEUDES tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan dan penerimaan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 50 (2);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Permendagri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- Adiwiharja, C., Kuryanti, S. J., Suryadi, A., & Ambarsari, D. A. (2023). Penilaian Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi Dengan Menggunakan Domain PO (Plan And Organise). *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 2018-2014.;
- Agansa, I. G., & dkk. (2020). Audit Tata Kelola Teknologi Informasi pada Dinas Pariwisata Kabupaten X Menggunakan Framework COBIT 5. *Jurnal SISFOKOM (Sistem Informasi dan Komputer)*, 392-404.;
- Alremy, Z., Chang, V., Walters, R., & Wills, G. (2016). Critical success factors (CSFs) for information technology governance (ITG). *International Journal of Information Management*, 907-916.;

- Andry, J. F. (2016). Audit of IT Governance Based on COBIT 5 Assessments: A Case Study. *TEKNOSI*, 27-34.;
- Astuti, H. M., & dkk. (2017). Risks Assessment of Information Technology Processes Based on COBIT 5 Framework: A Case Study of ITS Service Desk. *Procedia Computer Science*, 569-576.;
- Bernandus, H. (2013). *Evaluasi layanan teknologi informasi berdasarkan kerangka kerja cobit*. Depok: Universitas Indonesia.;
- Darmawan, A. K., & dkk. (2019). Pengukuran Capability Level Kualitas Layanan E-Government Kabupaten Pamekasan Menggunakan Framework COBIT 5.0. *INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi*, 93-103.;
- Ekowansyah, E., & dkk. (2017). Audit Sistem Informasi Akademik Menggunakan COBIT 5 di Universitas Jenderal Achmad Yani. *SENASKI*, 201-206.;
- Fitroh. (2012). Penilaian Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi Dengan Menggunakan Domain PO (Plan And Organise). *SNATI*.;
- Efendi, A. (2020). Mekanisme audit kinerja berbasis teknologi informatika pada masa pandemi Covid-19 dan pengaruhnya terhadap proses pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor (JFA) aparat pengawas internal pemerintah. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta*, 53–62.;
- Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian Kulitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.;
- ISACA. (2012). *COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT*.;
- Jayanti, R., & Supriatna, I. (2024). Audit Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan Framework COBIT5(Studi Kasus Pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*, 179-188.;
- Kuryanti, S. J., & dkk. (2023). Penerapan Framework COBIT Untuk Peningkatan Tata Kelola Teknologi Informasi. *Journal of Student's Research in Computer Science*, 189-198.;
- Maryani, N., Natita, R. K., & Zaputra, A. R. R. (2023). The Influence of Information Technology Based Audit Procedures and Audit Experience on Audit Quality. *International Journal of Quantitative Research and Modeling*, 4(4), 276-285.
- Miranti, A. (2019). *Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5. (Studi Kasus: PT Praweda Ciptakarsa Infomatika)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.;
- Mufti, R. G., & dkk. (2017). Evaluasi Tata Kelola Sistem Keamanan Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 Fokus Proses APO13 dan DSS05(Studi Pada PT Martina Berto Tbk). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 1622-1631.;

- Mulyandini, V. C., & Anggionaldi, M. (2025). Hybrid Audit: Keahlian dan Integritas Auditor terhadap Kinerja Laporan Hasil Audit di Era Digitalisasi. *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 132-140.
- Mulyandini, V. C. (2010). Pengaruh Audit Kinerja Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Dinas Pemerintah Kota Cimahi. *Portofolio Volume 13 No. 1 Mei 2016: 1–20 ISSN: 1829, 7188*.
- Muttaqin, A. R., Wibawa, A. P., & Nabila, K. (2021). Inovasi Digital untuk Masyarakat yang Lebih Cerdas 5.0: Analisis Tren Teknologi Informasi dan Prospek Masa Depan. *Junral Inovasi Teknik dan Edukasi Teknologi*;
- Nugroho, H. (2014). CONCEPTUAL MODEL OF IT GOVERNANCE FOR HIGHER. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*;
- Nugroho, H. (2017). Proposed It Governance at Hospital Based on COBIT 5 Framework. *International Journal*, 52-58.;
- Paramita, D. R., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif (Edisi 3)*. Kabupaten Lumajang: Widya Gama Press.;
- Putra, V. D. C., & Romli (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Good Government Governance terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 7(1), 56-65.
- Putra, V. D. C., Hartikayanti, H. N., Rahmah, N. A., Windiarti, S., Siregar, I. W. (2024). Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Aplikasi Akuntansi pada Umkm Dapi Sano. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(4), 184-198.
- Putri, M. A., & dkk. (2017). Maturity Evaluation of Information Technology Governance in PT DEF Using Cobit 5 Framework. *Journal of Information Technology and Computer Science*, 19-27.;
- Putri, M. d. (2017). Maturity Evaluation of Information Technology Governance inPT DEF Using Cobit 5 Framework. *Journal of Information Technology and Computer Science*.;
- R. Muhammad and I. Y. Matheus Edward, "Assessment of IT Governance of Bakti Internet Access Program Based on the COBIT5 Framework : Case Study: Balai Latihan Kerja Kendari," 2018 12th International Conference on Telecommunication Systems, Services, and Applications (TSSA), 1-5.;
- Raditya, M., & Yosef, E. M. (2018). Assesment of IT Governance of Bakti Internet Access Program Based on the COBIT5 Framework: Case Study: Balai Latihan Kerja Kendari. *Scopus Indexed*.;
- Rai, I.A (2008). *Audit Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Setiawan, A. K., & Andry, J. F. (2019). It Governance Evaluation Using Cobit 5 Framework On The National Library. *Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System)*, 10-17.;
- Surebdro, K (2009). Implementasi Tatat Kelola Teknologi Informasi. Bandung: Informatika.;

- Sulaiman, A. I. (2012). TANTANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DALAM E-GOVERNMENT. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 71-81.;
- Suyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.;
- Syuhada, A. M. (2021). Kajian Perbandingan COBIT 5 dengan COBIT 2019 sebagai Framework Audit Tata Kelola Teknologi Informasi". . *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 30-39.;
- Weill, P., & Ross, J. W. (2004). *IT Governance: How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results*. Harvard Business School Press.;
- Widayanto, S. R., dkk. (2019). Evaluasi Manajemen Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 Domain Monitoring, Evaluate, and Assess pada PT. PLN (Persero) Kantor Pusat". *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 6956-6964.;
- Widiantari, P. E., dkk. (2024). Faktor Penerimaan dan Penggunaan Siswaskeudes. *Jurnal Elektronik Ilmu Komputer Udayana* , 201-210.;